



VOLUME 21 NO. 2, AGUSTUS 2021

# BULETIN LLDIKTI4

## LAPORAN UTAMA:

KEBIJAKAN "KAMPUS MERDEKA- MERDEKA BELAJAR"

## INFO LLDIKTI WILAYAH IV:

PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PTS DI LLDIKTI WILAYAH IV



@LLDIKTIWILAYAH4



## INFO PTS:

UNIVERSITAS WIDYATAMA  
"Revolusi Academic Atmosphere Melalui MBKM"

POLITEKNIK POS INDONESIA  
"Logistics Expert"

## SUSUNAN REDAKSI

### PENANGGUNG JAWAB

Ir. Dharnita Chandra, M.Si.

### PENYUNTING

Entin Hartini, S.Sos., M.Si.

Sobar, S.H.

### REDAKTUR

Prof. Dr. Atie Rachmiatie, M.Si.

### REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Anne Maryani, M.Si.

Dr. Manap Solihat, M.Si.

Drs. Ade Nedi Supardi, M.I.Kom.

Entin Hartini, S.Sos., M.Si.

Hevy Pratiwi, S.I.Kom.

### DESAINER GRAFIS

Donny Ginanjar, S.Kom., M.Kom.

Andri Budi Santoso, S.Kom.

### ALAMAT REDAKSI

Jl. PH.H. Mustofa No.38, Cikutra,  
Kec. Cibeunying Kidul,  
Kota Bandung,  
Jawa Barat 40124

SALAM REDAKSI.....	1
--------------------	---

Buletin Edisi Agustus 2021	
----------------------------	--

LAPORAN UTAMA.....	2
--------------------	---

- ◆ Kebijakan “Kampus Merdeka–Merdeka Belajar”

INFO LLDIKTI4.....	7
--------------------	---

- ◆ Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah IV
- ◆ Pembagian dan Penyerahan Alokasi Kuota KIP Kuliah 2021
- ◆ Sosialisasi KIP Kuliah Merdeka 2021
- ◆ LLDIKTI Wilayah IV Raih 4 Juara pada Ajang Anugerah Humas Dikti 2020

PROFIL PTS.....	14
-----------------	----

- ◆ Universitas Widyatama  
“Revolusi Academic Atmosphere Melalui MBKM”
- ◆ Politeknik Pos Indonesia  
“Logistics Expert”



Pandemik mungkin akan menjadi Endemik, demikian para pakar meramalkan kehidupan kita, yang mungkin bisa 5-10 tahun mendatang di lingkup oleh Virus Covid-19. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus memiliki kehidupan *New Normal*, Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau apapun namanya. Untuk itu, dengan segala perubahan dan keterbatasan yang ada. Alhamdulillah, Puji Syukur ke Hadirat Illahi Robbi, kami bisa menyelesaikan Buletin ini dengan harapan semoga dapat memberi manfaat yang optimal untuk insan perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah IV.

Pembaca yang mulia, Buletin kali ini melaporkan topik utamanya (masih) seputar implementasi konsep "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)". Program pemerintah yang dikomandani oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, sosok muda yang progresif revolusioner ini memang luar biasa. Selama ini kita terkungkung oleh pola atau mindset pembelajaran di perguruan tinggi yang relatif bersifat linier, *rigid, top down* atau berorientasi pada budaya paternalistik. Dengan adanya program MBKM ini, pemerintah menawarkan paradigma baru, kedaulatan pembelajaran dan memberikan nuansa Pendidikan yang lebih egaliter dan mempertimbangkan bahwa mahasiswa itu memiliki potensi, *passion/peminatan* serta cita-cita dan tujuan hidup yang berbeda. Selain itu para mahasiswa berhak merdeka memilih dan mengembangkan kompetensinya melalui fleksibilitas peta jalan perguruan tinggi. Untuk itu nampaknya tidak semua pimpinan dan sivitas akademika perguruan tinggi siap untuk "*Move On*" atau cepat menyesuaikan dengan program MBKM ini. Terbukti dari survei yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah IV, ternyata baru ada sekitar 40 % dari ratusan PTS yang menerapkannya secara menyeluruh.

Pembaca yang Budiman, Edisi buletin pertengahan tahun ini banyak mengangkat aktivitas LLDIKTI wilayah 4 dalam menjalankan peran dan fungsinya se-

bagai pembinaan, pengendalian dan pengawasan berbagai perguruan tinggi di provinsi Jawa Barat dan Banten. Informasi yang disajikan pada buletin ini dalam bentuk *feature* atau artikel yang dibahas secara mendalam sehingga, diharapkan sidang pembaca dapat memperoleh sesuatu informasi yang lengkap dan mendalam, walaupun memang tidak terlalu aktual seperti media digital. Untuk itu laporan utama menyajikan tentang "Seputar Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka", rubrik informasi seputar aktivitas/kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah 4 beserta "profil PTS" yang mengangkat Universitas Widyaatama dan Politeknik Pos Indonesia yang dianggap sudah berhasil menerapkan MBKM di kampusnya masing-masing. Tak lupa berbagai program dari Kemendikbudristek pusat yang terkait dengan PTS/PTN di wilayah IV, juga disuguhkan untuk melengkapi mozaik informasi kita tentang dunia perguruan tinggi.

Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah pemahaman, penyamaan persepsi, bahkan dapat menginisiasi para pembaca untuk tetap kreatif, produktif secara optimis, di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Akhir kata, kami senantiasa membuka diri untuk menerima berbagai informasi seputar kampus anda untuk berbagi, memotivasi serta menginspirasi rekan sejawat di perguruan tinggi lain di wilayah IV. Semoga wahana silaturahmi melalui Buletin ini, dapat berkontribusi untuk membangun dunia perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.

**Redaktur  
Prof. Dr. Atie Rachmiati, M.Si.**

## KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA - MERDEKA BELAJAR



Merespons kesiapan Perguruan Tinggi dilingkungan LLDIKTI IV dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), LLDIKTI menyebarkan kuesioner pada 200 responden dari berbagai Perguruan Tinggi di lingkungan Jawa Barat Banten dan hasil kuesioner menunjukkan respons implementasi kampus merdeka di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV antara lain sebesar 72% sudah mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, dan hanya 27% yang belum melaksanakan. Mayoritas Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI IV sudah mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, beberapa program kegiatan yang dicanangkan MBKM sudah dilaksanakan oleh PT seperti kegiatan magang, melibatkan mahasiswa dalam penelitian, kewirausahaan. Sehingga sebagian PT tidak terlalu asing dengan program MBKM.

Namun berkaitan dengan dokumen standar mutu baru 50,5% yang sudah memiliki dokumen standar mutu tentang merdeka belajar kampus merdeka sisanya 49,5% belum memiliki. Hal ini dapat dimaklumi karena kebijakan MBKM merupakan program baru yang perlu didalami dalam implementasinya dikaitkan dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM PT dan ini berimbang pula pada implementasi 8 kegiatan pembelajaran MBKM. Dari sebanyak 8 Bentuk Kegiatan Program (BKP) MBKM yang paling

banyak sudah dilakukan ialah program magang yaitu sebesar 82%, karena pada umumnya PT sudah melaksanakan kegiatan magang jauh sebelum dicanangkan Program MBKM.

Program MBKM sejak dicanangkan kemendikbud menjadi tantangan tersendiri bagi kampus di Indonesia. Sebagian merasa siap dengan program tersebut, namun banyak juga yang terkendala karena berbagai persoalan seperti yang dihasilkan survei LLDIKTI yaitu, faktor eksternal makro seperti adanya pandemi Covid-19, Konversi Kegiatan MBKM ke SKS Mata Kuliah yang tidak sesuai dengan CPL, PTS masih dalam penjajakan implementasi, karena belum adanya *role model* implementasi kegiatan dari MoU sampai konversi SKS, keterbatasan sarana dan prasarana juga SDM, belum ada mahasiswa yang berminat. Setiap PT memiliki kendala yang mungkin berbeda dengan PT yang lain sesuai dengan kapasitas dan kesiapan PT dalam merespons kebijakan MBKM.

Sementara itu untuk mengimplementasikan kegiatan MBKM di luar program studi juga dialami berbagai kendala yaitu, Desain Kurikulum dan mekanisme pemberian SKS, mayoritas PTS sudah punya program serupa MBKM dan yang sudah memberikan SKS sesuai dengan arah kebijakan MBKM, ketersediaan Program, SDM dan kesediaan dosen pembimbing saat ini baru sedikit mahasiswa yang sudah menerima semacam bimbingan dari perguruan tinggi untuk ikut kegiatan MBKM, pendanaan program MBKM.

Implementasi kegiatan MBKM yang melibatkan Mitra juga merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu perlu disiapkan MoU antar Perguruan Tinggi dengan Mitra, kesiapan SDM, aspek finansial dan regulasi yang mengatur implementasi MBKM yang melibatkan Mitra dalam kegiatan MBKM.

### Latarbelakang Kebijakan MBKM

Berbagai bentuk kegiatan belajar yang dapat dilaksanakan di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Untuk menentukan dosen sebagai pembimbing kegiatan MBKM di luar kampus diperlukan kriteria khusus yang juga perlu dipertimbangkan PT. Kegiatan MBKM di luar kampus diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.

Latar belakang dicanangkannya kebijakan MBKM tersebut antara lain agar terbentuknya *hard* dan *soft skills* mahasiswa lebih kuat, apabila program ini diimplementasikan dengan baik. Selain itu juga untuk menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Mengingat perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa juga harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. “*Link and match*” tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Sehingga Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Selaras dengan latar belakang tersebut maka tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, ialah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk dapat mengikuti program “hak

belajar tiga semester di luar program studi” untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, sehingga mahasiswa dapat lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan agar menjadi bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel yang dirancang program MBKM diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

### Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

### Persyaratan umum dan Pelaksanaan

Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan



umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan kebijakan MBKM tidak luput dari keterlibatan beberapa pihak di dalam kampus yang terdiri dari mahasiswa sebagai sasaran belajar program MBKM serta PT, Fakultas, Program studi dan juga mitra yang bertanggungjawab dalam memfasilitasi terlaksananya program MBKM di kampusnya. Peran yang harus dilaksanakan oleh pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan program MBKM adalah sebagai berikut; Peran Perguruan Tinggi sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:  
a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.  
b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1

semester atau setara dengan 20 SKS, Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

Selanjutnya pihak Fakultas yang harus memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. Peran Program Studi juga sangat penting dalam menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, jika ada mata kuliah/ SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Mahasiswa sebagai subjek program MBKM berperan dalam merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi, mendaftar program kegiatan luar prodi, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Pihak selanjutnya adalah Mitra yang membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

### Penjaminan mutu MBKM

Implementasi program MBKM tidak dapat dilepaskan dari standar mutu pelaksanaannya sehingga memiliki standar mutu yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu Perguruan Tinggi perlu menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. PT dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Perguruan Tinggi. Penetapan mutu untuk menjamin kualitas implementasi program MBKM khususnya program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, perlu mempertimbangkan beberapa standar mutu antara lain:

1. Mutu kompetensi peserta;
2. Mutu pelaksanaan;
3. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal;
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
6. Mutu penilaian.

Setelah Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka disusun dan ditetapkan wajib didiseminasi dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang. Sehingga dapat terbangun kesamaan persepsi diantara berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan MBKM sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan kebijakan MBKM.

### Monitoring dan Evaluasi MBKM

Selain menetapkan mutu untuk menjamin kualitas pelaksanaan program MBKM, perlu disusun pula mekanisme formal program “hak belajar tiga semester di luar program studi” untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik.

Pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri.

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh target yang telah dicapai dan belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM.



# MENGENAL MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

## Kemerdekaan Belajar

**"Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka suka."**

**Nadiem Anwar Makarim  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**



Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Prinsip Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi. Selain komponen di atas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

Nadiem Makarim, B.A., MBA., Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI), Rabu (2/6/2021), memaparkan bahwa, Program MBKM memang menjadi salah satu unggulan pemerintah dalam

mengatasi permasalahan dunia pendidikan tinggi saat ini, yaitu penyerapan tenaga kerja dan relevansi lulusan dengan dunia industri. "Tingkat serapan lulusan perguruan tinggi saat ini di dunia kerja memang masih rendah. Sampai Februari 2021, komposisi penyerapan tenaga kerja dari perguruan tinggi hanya sekitar 10,18 %. Banyak tantangan yang juga harus dihadapi mahasiswa ke depan, diantaranya adalah disrupti teknologi dan otomasi dunia kerja yang memunculkan berbagai macam jenis pekerjaan yang baru".

Program MBKM dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan PT, apabila terdapat persamaan persepsi dari berbagai pihak terkait pelaksanaan dan tujuan program MBKM tersebut dan implementasi MBKM dilaksanakan sesuai standar penjaminan mutu yang disusun untuk menjamin kualitas dari pelaksanaan program MBKM sehingga sesuai dengan tujuan program MBKM.

## PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV



Saat ini LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten sedang melaksanakan Program kebijakan Penggabungan dan Penyatuan PTS sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Landasan hukum kebijakan Penggabungan dan Penyatuan PTS di seluruh Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun, tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta, dan petunjuk teknis Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020, tanggal 16 Juni 2020, tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Penggabungan dan Penyatuan PTS menurut Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM, menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan di atas, pengertian Penggabungan dan Penyatuan PTS adalah sebagai berikut:

Penggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik Baru. Badan

Penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah adalah satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung. PTS yang bergabung dapat berupa:

- 1 (satu) atau lebih PTS Akademik yang bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik baru.
2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru.
3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik baru.

Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan adanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan. Terdapat berbagai alasan pengajuan izin Penyatuan PTS Akademik antara lain:

1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi program studi untuk suatu PTS Akademik

2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi, sehingga penyatuan PTS tersebut akan mendapatkan akselerasi perwujudan visi PTS Akademik yang ada.
3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam menyelenggarakan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa hal dilakukan Penyatuan PTS Akademik.
4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan beberapa PTS Akademik.

Menurut Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten Ir. Dharnita Chandra, M.Si dan Sub Koordinator Kelembagaan Tarya Sutaryo, S.Sos, Kebijakan Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2020 merupakan kelanjutan dari kebijakan Penggabungan dan Penyatuan yang pernah digulirkan pada tahun 2016 melalui Permenristekdi Nomor 100 Tahun 2016 dan, tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Ijin PTS.

Tujuan Penggabungan dan Penyatuan PTS adalah untuk mengurangi jumlah PTS yang ada, karena Indonesia adalah salah satu negara yang secara kuantitatif jumlah PTS paling banyak. Penggabungan dan Penyatuan khususnya ditujukan Badan Penyelenggara PTS yang mengelola lebih dari 1 (satu) PTS. Selain itu yang lebih penting adalah secara kualitatif kebijakan Penggabungan dan Penyatuan diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola lebih baik, dan paling diharapkan adalah kualitas lulusan mahasiswa PTS.

Dharnita menegaskan, bahwa kriteria untuk menentukan PTS yang akan disarankan untuk Penggabungan atau Penyatuan dengan PTS lain akan dilihat dari jumlah *student body* mahasiswanya.

Bagi Perguruan Tinggi Swasta yang jumlah *student body* mahasiswanya kurang dari 1.000 (Seribu) mahasiswa. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV telah diminta Direktorat Pembelajaran dan Kemamasiswaan untuk menginventarisir PTS yang jumlah mahasiswanya di bawah 1.000 (seribu).

Terkait dengan Penggabungan dan Penyatuan PTS, Bagian Kelembagaan telah

membuat dan mengirimkan *google form* ke PTS yang ingin melakukan Penggabungan dan Penyatuan. Selama ini LLDIKTI Wilayah IV tidak punya data tentang PTS yang akan melakukan Penggabungan dan Penyatuan, padahal banyak PTS yang meminta data PTS melakukan penggabungan dan penyatuan, salah satunya ada salah satu PTS terkemuka yaitu Universitas Katolik Parahyangan, mempunyai keinginan membuka Program Studi Ilmu Keguruan dan Pendidikan dengan melalui program Penyatuan PTS bidang pendidikan.

Tindak lanjut dari pengisian *google form* adalah setelah diketahui PTS yang akan melakukan program Penggabungan dan Penyatuan, LLDIKTI Wilayah IV akan mengundang perguruan tinggi tersebut. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV mengundang keseluruhan PTS untuk sosialisasi program Penggabungan dan Penyatuan keseluruhan PTS yang jumlahnya 460 (Empat Ratus Enam Puluh) tidak efisien, ujar Dharnita. Karena tidak semua Perguruan Tinggi Swasta berminat untuk melakukan Penggabungan dan Penyatuan, apalagi PTS yang besar. Prioritas yang diundang itu adalah PTS yang memang berkeinginan untuk untuk melakukan Penggabungan dan Penyatuan. Untuk itu Perguruan Tinggi tersebut diberikan pendampingan.

Berkaitan dengan persyaratan, prosedur dan mekanisme Penggabungan dan Penyatuan PTS, Sub Koordinator Kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah IV Tarya Sutaryo, S.Sos menjelaskan bahwa bila ada Yayasan Perguruan Tinggi Swasta berkeinginan untuk melakukan Penggabungan dan Penyatuan berlaku persyaratan, prosedur dan mekanisme yang harus sesuai dengan petunjuk teknik Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020, tanggal 16 Juni 2020, tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik. Seandainya Ketua Yayasan sebagai Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta berkeinginan untuk melakukan Penggabungan atau Penyatuan langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Ketua Yayasan PTS mengusulkan ke LLDIKTI untuk memperoleh rekomendasi Penggabungan atau Penyatuan. Dalam penggabungan ini yayasan harus melampirkan data pendukung terkait legalitas dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang bergabung baik dari akta pendirian awal, akta perubahan, legalitas dari Kemenkumham sampai akta yang terakhir.

## Info LLDIKTI Wilayah IV

2. Yayasan harus menyampaikan dokumen terkait dengan sarana dan prasarana termasuk meliputi didalamnya kampus, karena setelah bergabung menjadi universitas berbeda. Sebelum bergabung bentuk perguruan tinggi akademi atau sekolah tinggi persyaratannya berbeda. Persyaratan lahan hanya 5.000 m<sup>2</sup>, tetapi setelah bergabung menjadi universitas persyaratannya 1 hektar atau 10.000 m<sup>2</sup>, itu harus ke LLDIKTI sebagai dokumen bukti pendukung dalam rangka memperoleh rekomendasi dari LLDIKTI. Dari dokumentasi pendukung tersebut nanti diverifikasi dan divalidasi oleh kelembagaan di LLDIKTI.
3. Dalam hal LLDIKTI menerbitkan rekomendasi itu hanya berpatokan terhadap 3 aspek, pertama aspek legalitas yaitu akta pendirian yayasan yang akan bergabung, kedua aspek rekam jejak, rekam jejak itu ada dua, yaitu rekam jejak dengan yayasan dan rekam jejak dengan perguruan tinggi yang bergabung. Dan ketiga aspek kejemuhan dari program studi terutama program studi yang akan diusulkan prodi baru pada saat penggabungan. Karena tidak sedikit dari program studi terutama program studi yang diusulkan sebagai program studi baru pada saat penggabungan, karena tidak sedikit perguruan tinggi pada saat yang bergabung antara sekolah tinggi dan akademi, setelah dihitung syarat prodi minimal tidak terpenuhi jadi dalam hal ini yayasan universitas punya kewajiban untuk mengusulkan prodi baru bersamaan dengan penggabungan, karena seandainya yayasan mengusulkan penggabungan menjadi universitas, salah satu syarat universitas itu harus memiliki program studi sebanyak 5 (lima) program studi dengan komposisi 3 (tiga) Eksakta dan (dua) Sosial, seandainya syarat itu belum terpenuhi, yayasan punya kewajiban mengusulkan pembukaan prodi baru untuk memenuhi persyaratan minimal. Terkait proses penggabungan, Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi memfasilitasi dengan membuat aplikasi Silemkerma, jadi semua dokumen yang telah memenuhi persyaratan untuk proses penggabungan mereka diberikan akun, setelah memperoleh akun mereka semua upload semua dokumen usulan penggabungan melalui laman Silemkerma. Setelah dokumen masuk ke Aplikasi Silemkerma (Sistem Informasi Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi), Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi akan melakukan verifikasi dan validasi.

Aplikasi Silemkerma (Sistem Informasi Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melakukan verifikasi dan validasi.



Dari tahun 2019 sampai 2021 di LLDIKTI Wilayah IV terdapat 20 (dua puluh) PTS melaksanakan program Penggabungan, 2 (dua) PTS melaksanakan program Penyatuan.

Insentif diberikan kepada PTS yang akan melaksanakan Penggabungan dan Penyatuan, pertama berupa Hibah dalam bentuk uang sebesar 100-200 juta, kedua uang bantuan tersebut untuk dipergunakan untuk biaya akta notaris, ketiga akan diberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen-dokumen didampingi bersamaa bagian kelembagaan kepada PTS yang akan melaksanakan penggabungan dan Penyatuan, keempat PTS yang akan melaksanakan penggabungan dan Penyatuan mendapatkan prioritas pelayanan di Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kendala dan yang dihadapi oleh LLDIKTI Wilayah IV dalam kaitan penerapan kebijakan Penggabungan dan Penyatuan PTS menurut Sub Koordinator Kelembagaan Tarya Sutaryo, S.Sos adalah ketiadaan aturan sanksi bagi PTS yang tidak mau melaksanakan kebijakan Penggabungan atau Penyatuan walaupun dari hasil evaluasi telah disarankan untuk melakukan proses Penggabungan atau Penyatuan. (ANS)\*\*\*

## Info LLDIKTI Wilayah IV

**Data Penggabungan/Penyatuan/ PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV  
2019 s.d. 2021**

No	No SK	Tanggal SK	PTS Sebelum Bergabung/Menyatu/berubah	PTS Setelah Bergabung/Menyatu/berubah	Keterangan
1	114/KPTI/2019	18 Februari 2019	STP Jabar, ST Komputer Al Ma'soeem	Universitas Al Ma'soeem	Penggabungan
2	238/KPTI/2019	25 Maret 2019	STF bandung, STIKES Bhakti Kencana Bandung, AKPER Bhakti kencana Bandung, STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya, AKBID Bhakti Nugraha, AKPER Bidara Mukti, AKBID Purna Husada	Universitas Bhakti kencana	Penggabungan
3	254/KPTI/2019	12 April 2019	AMIK Raharja, STMIK Raharja	Universitas Raharja	Penggabungan
4	608/KPTI/2019	25 Juli 2019	STMIK MIKAR, STT MIKAR	Universitas Mitra Karya	Penggabungan
5	664/KPTI/2019	02 Agustus 2019	STT Pelita Bangsa, STIE Pelita Bangsa	Universitas Pelita Bangsa	Penggabungan
6	687/KPTI/2019	09 Agustus 2019	Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi, STIKES Faletehan Serang	Universitas Faletehan	Penggabungan
7	803/KPTI/2019	10 September 2019	Akademi Akuntansi Bina Insani, ASM Bina Insani, STMIK Bina Insani	Universitas Bina Insani	Penggabungan
8	945/M/2020	06 Oktober 2019	STIE ISM dan STKIP SERA	Universitas Tangerang Raya	Penggabungan
9	952/KPTI/2019	10 Oktober 2019	Akademi perdaganagn CIC, STMIK CIC	Universitas CIC	Penggabungan
10	499/M/2020	30 April 2020	STB Bina Niaga, STMIK Bina Niaga, dan AMIK Bogor	Universitas Binaniaga	Penggabungan
11	575/M/2020	11 Juni 2020	STKIP Panca Sakti, STIE Indonesia Raya dan STMIK Cikarang	Universitas Panca Sakti	Penggabungan
12	606/M/2020	30 Juni 2020	STIE Primagraha, STKIP Pelita Pratama	Universitas Primagraha	Penggabungan
13	619/M/2020	07 Juli 2020	STIE Pengudi dan Institut Teknologi Kesehatan Jakarta	Universitas Global Jakarta	Penggabungan
14	632/M/2020	08 Juli 2020	STMIK Muhammadiyah Banten, STIBA Banten Raya	Universitas Muhammadiyah Banten	Penggabungan
15	1037/M/2020	26 September 2020	Akadmi Keperawatan Islamic Village Tangerang dan Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Cendekia Abditama	Universitas Cendekia Abditama	Penggabungan
16	912/M/2020	28 September 2020	Akbid Syahida dan STIKES Aisyiyah	Universitas Aisyiyah	Penggabungan
17	1247/M/2020	30 Desember 2020	STIE Al-Khairiyah dan STIKOM Al Kahiriyah	Universitas Al-Khairiyah	Penggabungan
18	22/E/O/2021	08 Februari 2021	STIE Pagaruyung	Universitas Kebangsaan	Penyatuan
19	45/E/O/2021	09 Februari 2021	STKIP Subang, STMIK Subang, STIE Kridatama, Politeknik Kridatama	Universitas Mandiri	Penggabungan
20	127/E/O/2021	09 April 2021	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indone sia Membangun	Universitas Indonesia Membangun	Penggabungan
21	254/E/O/2021	18 Juni 2021	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani	Universitas Jenderal Achmad Yani	Penyatuan
22	339/E/O/2021	22 Juli 2021	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSAP, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sebelas April Sumedang, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Sebelas April Sumedang	Universitas Sebelas April	Penggabungan

## Pembagian dan Penyerahan Alokasi Kuota KIP Kuliah 2021



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV melaksanakan Kegiatan Pembagian dan Alokasi Kuota KIP Kuliah Tahun 2021 yang dihadiri oleh wakil pimpinan bidang kemahasiswaan dan pengelola operator KIP Kuliah Merdeka Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV melalui media daring *Zoom Meeting*.

Diawali dengan laporan kegiatan oleh Sub Koordinator Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah IV, Yayan Mulyana, SE., MM. KIP kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. "Mudah-mudahan seluruh kuota yang akan dibagikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak ada lagi mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah mengundurkan diri atau tidak aktif ditengah jalan". ujarnya.

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Ir. Dharnita Chandra, M.Si hadir memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya beliau menyampaikan untuk tahun 2021 ini,

LLDIKTI Wilayah IV mendapat alokasi KIP Kuliah sebanyak 7.701 yang terbagi ke 318 PTS yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV. "Semoga kuota yang kami berikan ini dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi anak didik kita" sambut Dharnita.

Kegiatan Pembagian dan Alokasi Kuota KIP Kuliah Tahun 2021 ini mengundang 318 Perguruan Tinggi pengusul KIP Kuliah Merdeka 2021 di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV.

## Sosialisasi KIP Kuliah Merdeka 2021

**Sosialisasi  
KIP KULIAH MERDEKA  
PIP PENDIDIKAN TINGGI**

**Dr. Ruknan, S.Sos., M.M., M.Pd**  
Kordinator KIP Kuliah,  
Kemendikbud  
**081295822669**

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LLDIKTI WILAYAH 4**  
2021-05-10 10:30:18

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV melaksanakan kegiatan Sosialisasi KIP Kuliah Tahun 2021 yang mengundang seluruh wakil pimpinan bidang kema-hasasiswaan dan pengelola KIP Kuliah Merdeka Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV melalui media daring *Zoom Meeting*.

Diawali dengan laporan kegiatan oleh Sub Koordinator Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah IV, Yayan Mulyana, SE., MM. "Maksud dan tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang proses dan persyaratan KIP Kuliah tahun 2021 dengan skema baru". jelasnya.

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Ir. Dharnita Chandra, M.Si hadir memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya beliau menyampaikan sebagaimana diketahui bahwa KIP Kuliah ini diadakan setiap tahun dimulai tahun 2020 –sebelumnya disebut dengan bidikmisi. "untuk tahun lalu, KIP Kuliah diberikan kepada 227 PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV". sambut Dharnita.

"Sesuai dengan surat kami dengan nomor

surat 2324/LL4/KM/2021 perihal kesanggupan menjadi penyelenggara program KIP Kuliah Tahun 2021, maka kami akan menunggu usulan dari PTS untuk menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh KIP Kuliah ini sampai dengan tanggal 28 Mei 2021" ujarnya.

Tahun 2021, kuota yang tersedia untuk KIP Kuliah di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV adalah sebanyak 7701.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Koordinator KIP Kuliah Puslapdik Kemendikbud, Dr. Ruknan, S.Sos., MM., M.Pd., Dalam paparannya, beliau menjelaskan tentang teknis program KIP Kuliah tahun 2021.

## LLDIKTI Wilayah IV Raih Juara pada Ajang Anugerah Humas Dikti 2020

Pada era ini humas memiliki tugas yang semakin kompleks, peran dan fungsi humas menjadi sangat penting dan tak tergantikan, selain membangun reputasi lembaga, namun humas juga harus dapat menangani komunikasi krisis yang terjadi dalam publik internal maupun publik eksternal. humas pemerintah wajib menciptakan iklim kondusif dengan cara menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan antarlembaga.

Humas adalah corong informasi bagi sebuah lembaga, artinya, informasi yang dikeluarkan oleh lembaga berasal dari satu pintu, yaitu humas. Hal ini untuk menjaga dari bias dan keambiguan informasi. Dengan demikian, setiap pengambil kebijakan dalam lembaga harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada humas atas kebijakan yang dikeluarkan, yang kemudian akan diinformasikan kepada publik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), setiap tahun menyelenggarakan Anugerah Humas Dikti. Ajang penghargaan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh humas satuan kerja yang berada di bawah binaan Dirjen Dikti yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Kategori Anugerah Humas Dikti 2020 terbagi menjadi kategori media sosial, laman, siaran pers, majalah, insan humas terpopuler dan

laporan kerjasama untuk masing-masing jenis bentuk satker, yaitu PTN-BH, PTN-BLU, PTN Satker dan LLDIKTI.

Tahun 2020 ini LLDIKTI Wilayah IV kembali mengikuti Anugerah Humas Dikti dalam beberapa kategori diantaranya kategori media sosial, laman, majalah, insan humas terpopuler dan laporan kerjasama. Seluruh satker diharuskan untuk membuat laporan dari masing-masing kategori yang akan diikuti dan mengirimkan melalui tautan yang telah disiapkan. Setelah itu laporan dinilai oleh Tim Juri Anugerah Humas Dikti 2020 dan dipilih 5 besar untuk masing-masing kategori. Seluruh satker yang masuk ke dalam 5 besar diwajibkan untuk melakukan presentasi kepada Tim Juri.

LLDIKTI Wilayah IV kembali meraih juara pada Anugerah Humas Dikti 2020 pada 3 kategori yaitu:

1. Terbaik kedua untuk kategori Media Sosial
2. Terbaik kelima untuk kategori Laman
3. Terbaik ketiga untuk kategori Laporan Kerjasama

Semoga dengan diraihnya anugerah ini dapat terus memacu LLDIKTI Wilayah IV untuk dapat terus memberikan pelayanan yang lebih cepat serta prima kepada para pemangku kepentingan.





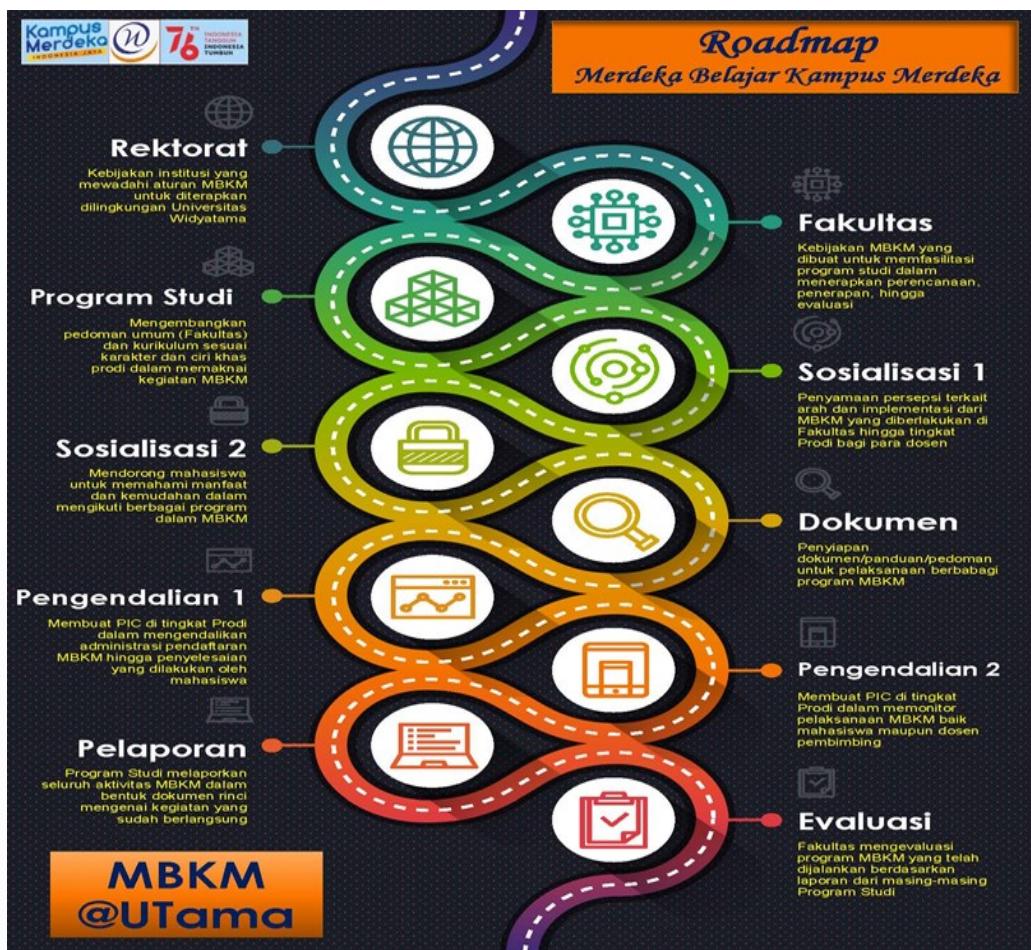
## Universitas Widyatama: “*Revolusi Academic Atmosphere Melalui Merdeka Belajar : Kampus Merdeka*”

Dalam menghadapi program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) yang di-canangkan oleh “Mas Menteri” Kemendikbudristek Nadiem Makarim, betul-betul pimpinan di perguruan tinggi harus menjadi nakhoda dalam mengawal paradigma perubahan yang luar biasa, sehingga seperti merevolusi mulai dari *mindset* Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan juga merubah atmosfir akademik di kampusnya masing-masing. Demikian Prof. Dr. Dadang Suganda, Warek 1 Universitas Widyatama dalam wawancara melalui *Zoom Meeting* beberapa waktu yang lalu. Kelebihan Universitas ini, ketika pada 25 Agustus yang lalu telah menyelenggarakan FESTIVAL MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA dengan tagline-nya “TerUTama & Terdepan Implementasi MBKM”. Pembelajaran yang relevan dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha. Sementara perguruan tinggi lain sebagian besar masih tergagap dengan pelaksanaan MBKM ini.

Prof. Dr. Dadang Suganda sebagai personil yang turut mendesain MBKM tingkat nasional, sudah tentu sangat menghayati nilai filosofis dari program MBKM ini, sehingga ketika implementasi di Universitas Widyatama menjadi sangat sistematis dan terarah. Langkah awal pimpinan Universitas ini adalah mengaudit Tridharma perguruan

tinggi untuk menyusun Peta jalan (*Roadmap*) MBKM yang digambarkan sebagai berikut :

**Pertama** pada tingkat rektorat, yang saat ini Rektor Universitas Widyatama diemban oleh Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si, pria kelahiran Sumedang yang masuk 50 peneliti terbaik se-Indonesia, adalah Menyusun kebijakan yang mwadahi aturan MBKM untuk diterapkan di lingkungan kampus. Demikian pula, tahap **kedua**, pada tingkat Fakultas menyusun kebijakan untuk dapat memfasilitasi program studi dalam mengimplementasikannya, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Adapun tahap **ketiga**, pada pimpinan prodi berperan untuk mengembangkan pedoman umum serta kurikulum sesuai karakter dan ciri khas prodi dalam memaknai program MBKM. Dengan demikian seluruh pimpinan di Universitas Widyatama bergerak sesuai dengan levelnya masing-masing untuk mensukseskan implementasi MBKM ini. Ketika wawancara berlangsung hadir Dr. Rozahi Istanbul, MT dekan Fakultas Teknik, yang dianggap lebih cepat mengimplementasikan MBKM secara teknis operasional di fakultasnya. Setelah kebijakan siap tersedia, maka untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama tentang MBKM pada seluruh sivitas akademika secara internal, termasuk filosofisnya,



ada pada tahap **keempat**, yaitu melakukan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Pada Sosialisasi tahap 1 bertujuan untuk penyamaan persepsi terkait arah dan implementasi dari MBKM yang diberlakukan di fakultas hingga tingkat prodi bagi para dosen. Dan sosialisasi tahap 2 adalah, mendorong mahasiswa untuk memahami manfaat dan kemudahan dalam mengikuti berbagai program dalam MBKM. Dalam mengimplementasikan MBKM ini karena program yang baru, maka pada tahap **kelima** adalah dokumentasi, yaitu penyiapan dokumen /panduan /pedoman untuk pelaksanaan berbagai program MBKM. Sehingga ada kepastian dan tertib administrasi bagi seluruh pihak yang menjalankannya.

Menurut Warek 1 Universitas Widyatama, dalam mengkondisikan implementasi MBKM di kampus juga melalui restrukturisasi dan reorientasi kurikulum. Bagaimana merancang aktivitas pembelajaran di luar prodi sendiri, tapi masih di dalam kampus, juga pembelajaran di luar kampus. Disini yang menjadi “ujung tombak” pelaksanaan MBKM adalah pada Program Studi beserta dosen-dosennya. Jadi yang diperlukan bukan dosen konvensional, namun dosen sebagai penggerak, yang

memotivasi para mahasiswa dan berprinsip secara agresif membuka ruang sumber-sumber belajar mahasiswa yang sesuai dengan 8 (delapan) bidang pembelajaran dalam MBKM yaitu :

- 1). Pertukaran Mahasiswa
- 2). Magang kerja
- 3). Mengajar di Sekolah
- 4). Proyek Penelitian
- 5). Membangun desa
- 6). Studi/Proyek Mandiri
- 7). Kewirausahaan Mahasiswa
- 8). Relawan Kemanusiaan

Sebagai bentuk pengembangan dari 8 jenis pembelajaran di luar kampus, Universitas Widyatama, dalam mengimplementasikan MBKMnya mengusung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keakademikan sosial;
2. Kesalehan sosial;
3. Kedermawanan sosial;
4. Kewirausahaan sosial.

Kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan membawa misi tersebut dapat direkognisi menjadi SKS. Ini juga wujud peningkatan *soft skill* untuk CPL-nya setiap mata kuliah yang ada di tiap-tiap prodi.

Dealnya memang perguruan tinggi harus “agresif” membangun kerjasama atau kolaborasi dengan dunia industri atau sebaliknya. Melalui Program MBKM yang sudah berjalan lancar, diharapkan ada benefit sebagai outputnya. Lulusan memiliki *hardskill*, *softskill*, *lifeskill*, *network*, pengalaman dan portofolio.

Adapun sebagai *outcome* dari program ini adalah akan tercipta para profesional di bidangnya, baik sebagai *entrepreneur*, *socio-preneur*, para ilmuwan, para birokrat atau para politisi yang berkualitas dan diperlukan masyarakat.

Tahapan selanjutnya dalam *roadmap* yang telah disusun di kampus yang terletak di jalan Cikutra, Bandung ini adalah pengendalian tahap 1 dan 2. Pada tahap 1 yaitu membuat PIC di tingkat prodi dalam mengendalikan administrasi pendaftaran MBKM hingga penyelesaian yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun pengendalian tahap 2 adalah membuat PIC di tingkat Prodi dalam memonitor pelaksanaan MBKM baik mahasiswa maupun dosen pembimbing. Setelah berlangsung penerapan MBKM maka ditetapkan “Pelaporan” yaitu Program Studi melaporkan seluruh aktivitas MBKM dalam bentuk dokumen rinci mengenai kegiatan yang sudah berlangsung, sehingga berbagai aktivitas dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Pada tahap akhir ada pada “Evaluasi” yaitu, Fakultas mengevaluasi program MBKM

yang telah dijalankan berdasarkan laporan dari masing-masing penyelenggaraan MBKM di masing-masing Program Studi.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan ketika mengimplementasikan MBKM di Universitas Widyatama adalah berhadapan dengan kendala/hambatan yang nampaknya bisa sama dirasakan juga oleh perguruan tinggi lainnya. Kendala yang terdeteksi oleh Prof. Dr. Dadang Suganda selama ini diantaranya : kultur teknis, yaitu merubah paradigma berpikir dosen dan mahasiswa yang diberikan kebebasan dalam pembelajaran. Karena ini suatu hal yang baru, maka tentu akan beradaptasi dengan kebiasaan baru juga. Kendala lain adalah penganggaran atau pendanaan yang dikaitkan dengan peran mitra dalam proses pembelajaran seperti apa dan bagaimana aturannya, juga bagaimana peran pemerintah untuk mendukung implementasi program ini. Sudah tentu kendala ini, di satu sisi dapat menumbuhkan peluang yang dapat mengakselerasi perolehan prestasi-prestasi Universitas Widyatama yang selama ini sudah banyak diperoleh.

### Perjalanan Panjang Universitas Widyatama

Sejarah Universitas Widyatama (UTama) bermula dengan pendirian Institut Akuntansi Bandung (IAB) di bulan Maret 1973 oleh **Prof. Dr. Koesbandijah Abdul Kadir, Ak.**, beliau adalah seorang praktisi sekaligus pendidik yang seluruh hidupnya diabdikan untuk kepentingan pendidikan. Tahun 1976, Yayasan selaku penyelenggara membuka program studi Manajemen Perusahaan (Strata 1) dengan nama Institut Manajemen Bandung (IMB).





Selanjutnya, kedua Institut tersebut bergabung menjadi Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Bandung (STAMPB), yang kemudian pada tanggal 3 September 1979 berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB). Kiprah STIEB yang diakui masyarakat luas mendorong Yayasan mengembangkan beberapa sekolah tinggi lain, yaitu: Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Widyatama (STTW, tahun 1995); Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Bandung (STIBB, tahun 1996); Sekolah Tinggi Disain Komunikasi Visual (STDKV, tahun 1999); serta Program Magister Manajemen Widyatama (MM-Widyatama, tahun 2000).

Tujuan pendirian institut dan sekolah tinggi tersebut adalah untuk membantu putra-putri PNS, Guru-Guru, dan masyarakat kurang mampu yang memiliki prestasi akademik sangat baik untuk memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tujuan tersebut, sesuai dengan cita-cita **Prof. Dr. Koesbandijah Abdul Kadir, Ak.**, adalah untuk berpartisipasi menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia dengan meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung.

Universitas Widyatama secara resmi berdiri pada tanggal 2 Agustus 2001 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.137/D/O/2001 sebagai hasil penggabungan dari: Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Widyatama (STTW), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Bandung (STIBB), dan Sekolah Tinggi Disain Komunikasi Visual (STDKV) dan Program Magister Manajemen Widyatama. Pada periode awal penggabungan keempat Sekolah Tinggi dan Program Magister Manajemen menjadi universitas tersebut, Universitas Widyatama memiliki empat fakultas, yaitu **Fakultas Ekonomi** dengan Program Studi Manajemen (S-1 dan D-3), Program Studi Akuntansi (S-1 dan D-3), dan Program Magister Manajemen (pasca sarjana) dalam konsentrasi Keuangan, Marketing, dan Sumber Daya Manusia; **Fakultas Teknik** dengan Program Studi Teknik Industri (S-1), Teknik Informatika (S-1), dan Sistem informasi (S-1); **Fakultas Bahasa** dengan Program Studi Bahasa Inggris (S-1), dan Bahasa Jepang (S-1 dan D-3); dan **Fakultas Desain Komunikasi Visual** dengan Program Studi Desain Grafis (D4), dan Multimedia (D3).

Penggabungan (*merger*) dari keempat Sekolah Tinggi dan Program Magister Manajemen menjadi Universitas Widyatama tersebut telah dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan mendalam menyangkut seluruh aspek yang berpengaruh. Tahapan perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan evaluasi penggabungan melibatkan banyak unsur, baik itu pada tingkat strategi kebijakan maupun pada tataran teknis operasional.

## Profil PTS - Universitas Widyatama

Dengan dilakukan penggabungan tersebut diharapkan akan diperoleh berbagai manfaat dan sinergi serta peningkatan nilai tambah pada berbagai sektor, meliputi: peningkatan kompetitif *advantage* lembaga, tata kelola organisasi, kapasitas dan kualitas, peningkatan sarana prasarana, kualitas akreditasi institusi maupun program studi, layanan pembelajaran, serta kontribusi Universitas Widyatama terhadap sosial ekonomi masyarakat luas.

Setelah 17 tahun berdiri melalui proses penggabungan, perkembangan Universitas Widyatama sangat signifikan menuju ke arah terbaik. Dari sisi kelembagaan, Rektor Universitas Widyatama menyatakan bahwa, saat ini sudah mampu menyelesaikan 5 Fakultas, yaitu : Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa, Fakultas Desain Komunikasi Visual dan Fakultas Ilmu Sosial & Politik (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 137/D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001). Dalam memberikan Layanan Pendidikan Tinggi pun, Universitas Widyatama sudah menerapkan dan menjalankan standar ISO yang mencakup semua proses yang relevan di penyediaan pendidikan, proses manajemen, proses belajar mengajar, proses realisasi, proses evaluasi, penyediaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk desain kurikulum. Seperti yang diketahui, UTama sudah melakukan ISO dari tahun 2003, mulai ISO 9001:2000, 9001:2008 dan saat ini sudah *upgrade* ke ISO 9001:2015.

Dengan Sekolah Pascasarjana, Universitas Widyatama memiliki total 22 program studi yang seluruhnya telah terakreditasi dari BAN-PT, dengan 8 program studi mendapatkan predikat A dan 3 Program Studi telah mendapatkan Akreditasi Internasional dengan Predikat *Premier* (Unggul)

dari ASIC (*Accreditation Service for International Schools, Colleges and University*), badan akreditasi independen yang berbasis di United Kingdom (UK). Selain itu, pada tahun 2018 Fakultas Teknik telah menambah 3 Program Studi Baru yaitu Program Studi Teknik Mesin (S1), Program Studi Teknik Sipil (S1) dan Program Studi Teknik Elektro (S1). Selanjutnya pada tahun 2021 Universitas Widyatama telah menambah 1 Fakultas Baru yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan Program Studi Produksi Film dan Televisi (S1), Program Studi Perdagangan Internasional (S1) dan Program Studi Perpustakaan & Sains Informasi (S1).

Salah satu keunikan Universitas ini adalah pendirian “Art Therapy Center” pada Maret 2014, sebagai bentuk representasi kepedulian Yayasan Widyatama terhadap pendidikan bagi anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas di Indonesia. Pendirian Lembaga ini merupakan pemberdayaan dari Program Studi Multimedia, dimana salah satu divisinya adalah mengembangkan alat-alat untuk membantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berkomunikasi melalui pendekatan seni. Alat tersebut berupa gambar dengan konsep stimulus bicara yang telah dikembangkan dengan menggunakan aplikasi yang pengembangannya dilakukan oleh mahasiswa Prodi Multimedia.

### Keunggulan Universitas Widyatama

Setiap perguruan tinggi memiliki branding tersendiri sebagai keunggulannya. Salah satu keunggulan yang membedakan Universitas Widyatama yang menjadi pembeda dari ratusan PTS dan PTN yang ada di LLDIKTI Wilayah IV ada pada “Kekuatan *Soft Skill*”, demikian ujar Warek I, Prof. Dadang Suganda.



## Profil PTS - Universitas Widyatama

Untuk “Hard skill” yang tertuang dalam Tri-dharma perguruan tinggi, sudah biasa, apalagi kurikulum kita semua “terkurung” oleh ketentuan pemerintah.

Diantara keunggulan *soft skill* itu adalah pembentukan karakter yang dikemas dalam Perkuliahannya Bersama Pembentuk Karakter Widyatama (PBPWK). PBPWK ini mengintegrasikan substansi MKDU (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) dengan motto UTama DJITU dan budaya Sunda. Inilah wujud implementasi penguatan soft skill mahasiswa dalam CPL-nya, dan menjadi kekhasan dalam mewujudkan manusia yang memiliki karakter yang dibutuhkan untuk kehidupannya kini dan yang akan datang. Demikian Rektor, Prof. Dr. Obsatar Sinaga, menegaskan tentang pentingnya pembentukan karakter di Universitas Widyatama.

Sudah tentu, diharapkan pada gilirannya akan terbentuk lulusan yang jujur, disiplin, inovatif, ulet dan karakter positif lainnya. Jadi disamping itu mereka lekat dengan nilai-nilai adiluhung yang ada dalam budaya Sunda, juga sekaligus memiliki etos bela negara yang tangguh. Mahasiswa diterpa supaya memahami interaksi dan menjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia, dengan alam dan dengan Tuhan.

Ketercapaian keunggulan universitas Widyatama ini, tidak terlepas dari keinginan dan cita-cita seluruh sivitas akademika yang dirumuskan dalam visi : “Menjadi universitas unggul dan mandiri di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional yang memenuhi kebutuhan industri

dan masyarakat serta mampu bersaing dalam lingkungan global tahun 2028”. Adapun misi yang telah dicanangkan adalah :

1. Menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta penelitian yang efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif.
3. Mengupayakan keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan akademis dalam rangka pembentukan manusia yang berbudi luhur.

Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri agar proses pembelajaran selalu mutakhir.

Disamping Universitas Widyatama sudah mencanangkan tujuan, juga universitas ini memiliki tata nilai yang sangat spesifik. Seluruh sivitas akademika bersinergi dan semangat dalam budaya “DJITU++”. Apakah DJITU++ ini ? rupanya singkatan dari **Disiplin, Jujur, Inovatif, Tekun, Ulet**. Jadi suatu tata nilai yang dianut dan dikembangkan di lingkungan Universitas Widyatama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Loyalitas, Dedikasi, Etika, dan Moralitas serta memiliki etos kerja **DJITU ++ yaitu plus (+)** yang pertama adalah, Rasa Memiliki (*Sense of Belonging*) dan Keterbukaan serta **plus (+)** yang kedua adalah, Perbaikan Terus Menerus (*Continuous Improvement*).





Berdasarkan strategi yang dicanangkan oleh para pimpinan universitas dan sivitas akademika, dukungan dan integrasi sarana prasarana yang sangat baik, termasuk berbagai diantaranya dukungan sistem informasi, serta dalam pengelolaan kelembagaan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, maka berikut beberapa prestasi yang telah diraih oleh Universitas Widyatama :

- Pada tanggal 18 Agustus 2020 kemarin Ranking Universitas Widyatama versi Ristek Dikti berada di posisi ke-57 dari 4.682 perguruan tinggi di Indonesia.
- Universitas Widyatama dalam Versi *Unirank (Webometrics)* berada di peringkat ke-55 Nasional dan Se-Jawa Barat Banten di peringkat ke -3 dan juga telah menerbitkan 1.373 artikel dengan jumlah dosen 272 orang dalam jurnal *Scopus Indexed* sejak Oktober 2018 sampai dengan hari ini, dan memiliki kolaborasi yang baik dengan *Chief Editor* beberapa jurnal Internasional, di Eropa dan Amerika Serikat.
- Dalam program SIMKATMAWA Ranking Universitas Widyatama berada di posisi ke-48 pemeringkatan bidang kemahasiswaan, tahun 2020.
- Universitas Widyatama memperoleh *Silver Award* (Juara Dunia ke-2) tahun 2019 dalam kegiatan *International Conference and Exposition on Inventions by Institutions of Higher*

*Learning* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

- Pada tanggal 20 Mei 2019, lembaga sertifikasi internasional dari ASIC (*Accreditation for International Schools, Colleges, and Universities*) Inggris, melakukan visitasi terhadap 6 Program Studi S1 (Manajemen, Akuntansi, Teknik Industri, Sistem Informasi, Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang D3), dan ke-6 Program Studi tersebut telah meraih Akreditasi Internasional dengan nilai “Premium ( A )”.
- Universitas Widyatama memperoleh penghargaan Presidential Award dari *International Council for Small Business category: Researcher and Academician* pada tanggal 14 November 2019.
- Universitas Widyatama telah mendapatkan 5 (lima) penghargaan dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia). Salah satunya adalah: *Job Fair Online Terlama* (selama 19 hari) dari tanggal 24 Juli 2020 s.d. 15 Agustus 2020.

Demikian serangkaian prestasi dan keunggulan Universitas Widyatama yang sesuai dengan mimpi yang dicanangkan dalam visinya yaitu menjadi universitas unggul dan mandiri di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional yang menuhi kebutuhan industri dan masyarakat serta mampu bersaing dalam lingkungan global tahun 2028, semoga. (ARS)



## **“POLIKTEKNIK POS INDONESIA : *LOGISTICS EXPERT!*”**

Politeknik Pos Indonesia adalah institusi pendidikan tinggi bidang vokasi yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) di bawah naungan PT. Pos Indonesia pada tahun 2001, dan akrab di sapa “Poltekpos”, dalam menghadapi program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dibawah pimpinan “Mas Menteri”, Nadiem Makarim yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sepertinya pimpinan institusi di perguruan tinggi harus gerak cepat dalam usaha mengimplementasikan program MBKM tersebut, sehingga perlu kesamaan persepsi dengan mengubah *mindset* di tingkatan program studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan seluruh *stakeholder* yang ada, untung saja bagi pendidikan vokasi seperti Poltekpos tinggal melakukan penajaman pada 8 program kegiatan MBKM yang dicanangkan karena pada dasarnya program tersebut sebagian telah jalan di pendidikan vokasi ini beda dengan institut atau universitas, jadi tinggal melanjutkan saja. Demikian disampaikan oleh Dr. Ir. Agus Purnomo selaku Direktur Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos) dalam temu muka melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 15 Agustus yang lalu.

Kelebihan Poltekpos dalam penyelenggaraan MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA yaitu mengimplementasi MBKM melalui pembelajaran yang relevan dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha dengan *Internship Program* dan *Project* yang telah berlangsung selama ini. Pada jalur Vokasi sudah mendarah daging beda dengan universitas atau institut, memaknai MBKM telah

terimplementasikan dengan baik, seperti contoh D3 selalu ada mata kuliah *internship* program magang selama 1 semester di industri bahkan sampai projek.

Dalam prosesnya, kebijakan MBKM di Poltekpos Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yaitu membuat kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tahapan tersebut berlangsung sejak dicanangkan program MBKM tahun 2020, dengan mekanisme:

1. Poltekpos Indonesia membuat aturan atau regulasi yang diberlakukan pada setiap level bidang baik pada tingkatan kelembagaan sampai kepada seluruh program studi.
2. Membuat buku pedoman yang harus dilaksanakan oleh seluruh program studi yang ada di lingkungan Poltekpos Indonesia agar dapat menerapkan 8 kegiatan MBKM tersebut,
3. Memilih langkah-langkah strategis dengan lebih mengintensifkan program yang berfokus pada pertukaran mahasiswa dan *internship*.
4. Bergabung dengan 8 aliansi Perguruan Tinggi BUMN, yang terdiri dari Telkom University, Universitas Pertamina, Telkom Surabaya, Poltekpos, BRI institut, ITT Purwokerto, Universitas Internasional Semen, STIE LAN. Dengan bergabungnya dalam aliansi PT BUMN masalah pendanaan bersifat *free* dari

- sisi pembiayaan dan bersifat *reciprocal*, agar sesama pengelola perguruan tinggi tidak lagi dipusingkan dengan masalah perbedaan pendanaan yang nantinya bisa menghambat karena disparitas biaya kuliah di bawah binaan BUMN yang ada relatif sama. Dengan diluncurkannya program "Permai BUMN", yang akan *running* pada bulan Desember ini. Mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah di luar program studi di lingkungan Poltekpos dan pada perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara.
4. Bentuk program lainnya adalah kewirausahaan digital bersama perhimpunan pengusaha muda Poltekpos, dengan melakukan ekivalensi dengan mata kuliah atau konversi.
5. Melakukan program Kampus Mengajar sebagai program baru, dengan melihat kompetensi yang sesuai dengan 6 dosen sebagai pembimbing, tugasnya mahasiswa membantu kegiatan operasional sekolah, membantu proses belajar dengan membuat *log-book* membuat perancangan program yang dipresentasikan dengan pihak sekolah, agar berbagai tantangannya dapat membantu pada proses pembelajaran di sekolah-sekolah, apalagi daring menggunakan perangkat HP/gadget tidak semua memiliki perangkat yang sesuai atau dimiliki terbatas oleh masing-masing keluarga, maka disinilah mahasiswa dapat terlibat dalam pendampingan proses belajar siswa dengan turun langsung.
6. Riset mahasiswa, *Information Research and Technology* (IRC) mahasiswa membuat produk-produk untuk diaplikasikan seperti menggunakan deteksi wajah dengan nama aplikasi ITEUNG sebagai program yang diterapkan di Poltekpos sebagai aplikasi melalui HP untuk kegiatan belajar mengajar seperti kehadiran dikelas. Juga aplikasi ATENG aplikasi untuk administrasi dosen dan karyawan dalam melakukan kegiatan aktivitas dikampus.
7. Pertukaran pelajar dengan pihak luar negeri juga dilakukan seperti dengan *Republic Politechnic* Singapura mempelajari dan lebih mengenal Singapura dan kebudayaannya. Kemudian juga mahasiswa dapat magang di Forum *Human Capital* Indonesia (FHCI), dengan penandatanganan kerjasama untuk dapat melakukan magang di BUMN dengan tersertifikasi, seperti dengan PT. Biofarma, PT. Pegadaian, PT. Pos Indonesia. Prosedurnya: mahasiswa mendaftar kepada perusahaan yg *eligible* dengan Poltekpos dengan memilih perusahaannya dengan mengupload pada FHCI, dan mahasiswa dapat magang dengan daring, *hybrid* dan *offline*, dengan diusahakan dengan pemagangan yang dekat dengan domisili supaya aman saat terjadi *match-up* (daring, *hybrid*). Luaran yang didapat sebagai contoh ada yang magang bahkan dapat langsung direkrut oleh perusahaan tersebut, bahkan 42 mahasiswa tergabung dalam *Management Trainee* di PT. Pos Indonesia, juga direkrut Pemerintah Daerah Kota Bandung.
8. Poltekpos Indonesia dalam implementasi program MBKM juga melakukan proyek kemanusiaan Membangun Desa yaitu membantu daerah terdampak bencana yang pelaksananya dikoordinir oleh BEM, dalam rangka mengoptimalkan program MBKM dibentuk juga Duta Merdeka Belajar PIC MBKM bidang akademik dan kemahasiswaan berada di bawah deputi akademik dan deputi kemahasiswaan.
- Dengan mengelaborasi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka pelaksanaan program MBKM di kampus Poltekpos Indonesia, yang meliputi kegiatan 8 (delapan) bidang pembelajaran dalam MBKM yaitu :
1. Pertukaran Mahasiswa
  2. Magang Kerja
  3. Mengajar di Sekolah
  4. Proyek Penelitian
  5. Membangun desa





6. Studi/Proyek Mandiri
7. Kewirausahaan Mahasiswa
8. Relawan Kemanusiaan

Perguruan Tinggi didorong harus “gerak cepat dan kreatif” membangun Kerjasama atau kolaborasi dengan dunia industri atau sebaliknya. Melalui Program MBKM yang sudah berjalan melalui program kegiatan yang telah di lakukan oleh Poltekpos Indonesia diharapkan semakin meningkatnya kompetensi yang unggul dalam hal *hardskill, softskill, lifeskill, network*, pengalaman dan portofolio yang meyakinkan.

### Selayang Pandang Politeknik Pos Indonesia

*Politeknik Pos Indonesia memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul di kawasan regional dalam bidang Logistik dan Manajemen Rantai Pasok pada tahun 2022.*

Politeknik Pos Indonesia yang berdiri sejak tahun 2001, memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul secara Nasional dalam bidang Logistik dan Manajemen Rantai Pasok. Dengan memiliki 9 program studi yang terdiri dari 5 program studi setara Diploma 3 (Ahli Madya) dan 4 Program Studi Diploma 4 (Sarjana Terapan), semua program studi di lingkungan Poltekpos Indonesia sudah mendapatkan akreditasi yaitu:

### 1. Program Diploma III (A.Md)

#### ♦ D3 Logistik Bisnis

Lulusan memiliki kompetensi dalam *Freight Fowarding, Export-Import, Warehousing, Container Terminal, Transportation,*

*Shipping Line, Express/Distribution, Procurement, dan National Disaster Management Agency*, prodi ini terakreditasi A.

#### ♦ D3 Teknik Informatika

Lulusan memiliki kompetensi sebagai *Junior System Designer, Junior Software Application Programmer, Junior Programmer, Junior Database Programmer, Junior Web Programmer, dan Junior Network Administrator*. Prodi ini terakreditasi B.

#### ♦ D3 Sistem Informasi

Lulusan memiliki kompetensi dalam *Data Management Information Systems, Computer Based Information Networks, Designing and Building a Database, Web and Desktop-Based Applications*, prodi ini terakreditasi B.

#### ♦ D3 Pemasaran

Lulusan memiliki kompetensi dalam *Design Message Marketing Communication, Preparation of Business Plan, Sales Operation, Operation Service, Marketing Plan, dan The Creator and Developer of Advertising Tools*, prodi ini terakreditasi B.

#### ♦ D3 Akuntansi

Mempersiapkan lulusan menjadi teknisi akuntansi yang memiliki sikap, menguasai pengetahuan dan ketrampilan, dibidang akuntansi, perpajakan, dan auditing pada suatu entitas bisnis/pemerintahan, prodi ini terakreditasi B.

### 2. Program Sarjana Terapan (S.Tr)

#### ♦ D4 Teknik Informatika

Lulusan memiliki kompetensi dalam *Design Computer Networks of Wireless & Wireline, Make Software, Database, Multimedia, dan Mobile Programming*, prodi ini terakreditasi B.

#### ♦ D4 Manajemen Bisnis

Lulusan memiliki kompetensi dalam *Design Message Marketing Communication, Preparation of Business Plan, Sales Operation, Operation Service, Marketing Plan, dan The Creator and Developer of Business Consultant*, prodi ini terakreditasi B.

#### ♦ D4 Akuntansi

Lulusan memiliki kompetensi dalam *Preparation Financial Statements Based on PSAK/IFRS, Preparation Standard Audit Working Paper, Cost Accounting, Budgeting Analysis dan Computer Based Accounting*, prodi ini terakreditasi B.

#### ♦ D4 Logistik Bisnis

Lulusan memiliki kompetensi dalam *Supply Chain Management, Freight Forwarding, Export-Import, Warehousing, Transportation, Procurement, dan National Disaster Management Agency*, prodi ini terakreditasi B.

Politeknik Pos Indonesia sedang mengajukan pembukaan program studi baru yaitu *e-Commerce Logistics* sebagai prodi satu-satunya dan menjadi yang pertama ada di Indonesia, maka pengajuan prodi tersebut sekaligus dengan menyusun nomenklatur prodi tersebut, dimana Lulusan memiliki kompetensi dalam *E-commerce Warehousing, Project E-Commerce Management, Web-Based Order Fullfilment, Distribution and Information Management, Last Mile Management, Export/Import, Web Design, Web Services, Mobile Programming, E-Commerce Research, Digital Marketing, Multimedia and Artifical Intelligence*.

Dengan jumlah mahasiswa 2500 orang Poltekpos Indonesia mengembangkan pendidikan yang disebut “*Integrated logistics and supply chain vocational education*”, dengan 5 komponen utama yaitu :

*Information Technology*

*Communication Skill*

*Entreupenership*

*Internship Program*

*Character Building*



Poltekpos Indonesia memandang bahwa dengan jumlah mahasiswa yang banyak dan animo masyarakat yang terus meningkat perlu di dukung dengan tenaga dosen yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, maka tenaga dosen terdiri dari para akademisi dan praktisi yang berpendidikan Magister dan Doktor berjumlah 100 orang dosen. Untuk kepentingan ini pula Poltekpos Indonesia melakukan kerjasama dengan lembaga lain, dianataranya dengan *German Corporation, Deutch Zvis Sommemarbel, Universal Postal Union, Highline College, Kapi'Olani Community College, Altisia Learning, Singapore Polytechnic, Republic Polytechnic, Melbourne Polytechnic*, Politeknik Nilai Nagari Sembilan Malaysia.

### Fasilitas Kampus

Politeknik Pos Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dengan lokasi yang sangat kondusif untuk belajar terletak dikawasan Bandung Utara yang sejuk tepatnya di Jalan Sariasisih No. 54 Sarijadi Bandung 40151 Jawa Barat, dengan luas lahan mencapai 44.000 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 20.000 m<sup>2</sup> tentunya yang sangat memadai, fasilitas dan unit penunjang yang ada di Poltekpos Indonesia diantaranya :

*Center of Technology (COT)*

Green Hotspot Area

Masjid Kampus

Free Internet

Kantin

Auditorium YPBPI

Gedung Olahraga

Lapangan Tenis

Panjat Tebing

Laboratorium Bahasa

Laboratorium Penunjang Akademik

Tempat Parkir

Ruang UKM (Unit Kreatifitas Mahasiswa)

Ruang Himpunan Mahasiswa (Ormawa)

Gedung Pendidikan

ATM Center

*Complex Problem Solving*

*Critical Thinking*

*Creativity*

*Emotional Intelegence*

*System Skill*

*Negotiation*

*People Manajemen*

*Kognitive Ability*

Menginjak usianya yang 2 dasawarsa, telah banyak pencapaian prestasi Poltekpos Indonesia diraih, selain telah terakreditasinya seluruh program studi dan akreditasi institusi, prestasi yang membanggakan lainnya adalah : adanya lembaga sertifikasi profesi yang mendapat pengakuan dari BNSP, telah meraih sertifikat ISO 9001:2015 dari TuvReinland, members dalam badan SAP (*Standard Application Product*), *University Partnership Program*.

Baru-baru ini Poltekpos Indonesia juga meraih Anugrah Award dari LLDikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, sebagai perguruan tinggi penerima hibah terbanyak dalam program pengabdian pada masyarakat (PKM), begitupun prestasi yang didapat dari mahasiswanya yang berhasil meraih pretasi, seperti :

1. Juara 3 Nasional IOT (*Internet of Things*), *E-Time*.
2. Juara 1 Nasional Olimpiade Teknologi Informasi Geeknastik.
3. Juara Harapan Nasional IOT (*Internet of Things*).
4. Juara 1 dan 2 Nasional Yamaha *Marketing Idea Competition*.
5. Juara harapan Nasional *Marketing Plan Competition*
6. Juara Nasional *Accounting Olympiade*

Demikian serangkaian pencapaian prestasi dan keunggulan Poltekpos Indonesia Bandung yang terus bergiat untuk meraih pretiasi yang lebih besar sebagai perguruan tinggi bidang vokasi dengan tagline “*Logistics Expert*”. (MSA)

### Keunggulan Poltekpos Indonesia

Setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan -keunggulan tersendiri., keunggulan yang membedakan Poltekpos Indonesia yang menjadi pembeda dari perguruan tinggi bidang vokasional diantaranya adalah lulusan siap pakai dengan kemampuan yang dimiliki sebagai berikut :

# KONTAK KAMI



@LLDIKTIWILAYAH4

(022) 7275630

+6282244121226

humas@lldikti4.or.id



Diterbitkan oleh :

LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten

Jl. P.H.H. Mustofa No. 38 Bandung-40124

<http://www.lldikti4.or.id>

ISSN: 1979-5203



9 771979 520004